

PERJUANGAN PANGERAN NOTOKUSUMO DAN IR. SUKARNO: KAJIAN KOMPARATIF HISTORIS

Harto Juwono

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret
hartojuwonomtl@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil kajian terhadap dua tokoh terkenal dalam sejarah Indonesia khususnya sejarah Jawa, yaitu Pangeran Notokusumo yang kemudian menjadi KGPA Paku Alam I dan Sukarno yang kemudian menjadi presiden pertama Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengangkat kesamaan nilai yang diperoleh dari proses perjuangan keduanya dalam menghadapi situasi di bawah dominasi kolonial. Untuk bisa mewujudkan tujuan ini, metodologi yang digunakan adalah strukturasi dengan tekanan pada peran *agent* dalam proses interaksi dan reproduksinya terhadap struktur yang ada, sehingga menghasilkan suatu bentuk struktur baru. Dengan analisis ini, proses perjuangan mereka bisa digambarkan dan terutama interaksi antara *agent* dan struktur yang ada (*agency*). Dari situ bisa ditemukan adanya bentuk perbandingan historis dalam struktur yang berbeda namun dengan system yang serupa, yaitu peralihan kekuasaan dari satu rezim ke rezim yang lain. Karena batasan dari tulisan ini adalah era sebelum kemerdekaan, data yang digunakan difokuskan pada data atau referensi yang dihasilkan pada era kolonial atau sezaman seperti khasanah arsip yang tersimpan di ANRI yaitu bundel Yogyakarta, dengan tambahan beberapa referensi sumber sekunder.

Keywords: Notokusumo, Sukarno, Pergantian Kekuasaan, Kerjasama, Struktur.

Abstract

This paper is the result of a study of two famous figures in Indonesian history, especially the history of Java, namely Prince Notokusumo who later became KGPA Paku Alam I and Sukarno who later became Indonesia's first president. The aim is to raise the common values obtained from the struggle process of the two in dealing with the situation under colonial domination. To be able to achieve this goal, the methodology used is structuration with an emphasis on the role of the agent in the process of interaction and reproduction of the existing structure, so as to produce a new form of structure. With this analysis, the process of their struggle can be described and especially the interaction between the agent and the existing structure (agency). From there it can be found that there is a form of historical comparison in a different structure but with a similar system, namely the transfer of power from one regime to another. Because the limitation of this paper is the pre-independence era, the data used is focused on data or references produced in the colonial era or contemporaries such as the archives stored at ANRI, namely the Yogyakarta bundle, with the addition of several secondary sources references.

Keywords: Notokusumo, Sukarno, Change of Power, Cooperation, Structure.

PENDAHULUAN

Tulisan ini berusaha mengungkapkan perbandingan dua tokoh yang memegang peranan penting dalam era dan struktur yang berbeda, namun menunjukkan pola taktik yang serupa untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Dari perbandingan tersebut, setidaknya ada dua hal yang sangat menentukan peran mereka.

Pertama, struktur yang berlangsung pada masa mereka hidup menunjukkan masa perubahan yang besar sebagai akibat dari pergantian rezim kekuasaan. Pangeran Notokusumo memainkan peran penting dan strategisnya pada masa pergantian rezim kekuasaan kolonial dari Belanda kepada Inggris, sementara Ir, Sukarno mengalami pergantian kekuasaan dari rezim kolonial Hindia Belanda menuju rezim militer Jepang lebih dari seabad kemudian. Dalam konteks historiografi Indonesia, kedua periode ini sangat penting di luar era pemerintahan kolonial Belanda, dan arti penting keduanya juga menghubungkan kepulauan Indonesia dengan perubahan konstelasi politik dunia pada zamannya: yang pertama dengan proses peperangan Napoleon di Eropa, yang kedua dengan Perang Dunia II di Pasifik.

Kedua, masing-masing memiliki kemampuan dan potensi untuk memainkan peranannya sehingga mereka bukan hanya mampu menyelamatkan diri dari polarisasi politik yang mewarnai strukturnya namun juga mampu memanfaatkan struktur tersebut untuk tampil dalam menempati posisi strategis dalam struktur baru yang diciptakan sebagai akibat perubahan politik. Keduanya memiliki kesamaan menghadapi struktur lama sebagai lawan utama dalam perjuangannya, yaitu rezim kolonial Belanda, dan memanfaatkan rezim atau struktur baru yang dibentuk pasca keruntuhan struktur lama. Dengan strateginya, keduanya juga memperoleh kepercayaan dari rezim penguasa baru yang memberi mereka peluang untuk memainkan peran strategisnya sehingga akhirnya membuka jalan menuju kesempatan dalam membentuk struktur baru.

Melalui perbandingan tersebut arti penting adalah membuktikan adanya perulangan pola yang dimainkan oleh taktik politik dari para tokoh yang berperan sebagai *agent* dalam perubahan struktur yang terjadi pada historiografi Indonesia. Meskipun dengan lingkup yang berbeda, Notokusumo pada level local sementara

Sukarno di tingkat nasional, keduanya mampu menggunakan kemampuan yang ada untuk membentuk tatanan baru dan memisahkan diri dari struktur lama. Dalam hal ini pola strategi politik yang melatar belakangi kesamaan dari keduanya, yakni latar belakang kehidupan budaya Jawa yang dominan menegaskan permainan politik yang sama pada kedua tingkatan itu.

Dengan melihat arti penting di atas, tulisan ini bermaksud untuk menampilkan makna yang bisa dipetik dari proses pembentukan struktur baru, Kadipaten Pakualaman dan Negara Republik Indonesia yang merdeka, yang dimotori oleh keduanya dalam konteks masing-masing. Terlepas dari perbedaan ruang dan waktu, tekanan yang diberikan di sini adalah menempatkan mereka dalam proses perubahan struktural dan interaksi yang mereka lakukan sebagai suatu proses yang berakhir pada penggantian struktur baru di bawah kepemimpinan masing-masing (*agency*).

Sejumlah karya pernah dibuat terkait dengan kedua tokoh sentral yang menjadi *agent* dalam karya ini. Antara lain karya C. Poensen, “Amangkoeboewana II” yang dimuat dalam majalah *Bijdrage tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal, Land en Volkenkunde* tahun 1905 yang antara lain mengisahkan peran Pangeran Notokusumo dalam proses pergolakan politik di Kesultanan Yogyakarta di bawah pemerintahan Sultan Hamengku Buwono II. Begitu juga dengan karya seorang penulis anonim, “Overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het Djocjakartasche rijk, sedert deszelfs stichting (1755) tot aan het einde van het Engelsche tusschenbestuur (1815)” dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, tahun 1844, jilid III, peran Pangeran Notokusumo mendapatkan posisi yang penting dalam proses peristiwa yang berlangsung di Yogyakarta.

Beberapa karya mengenai Ir. Sukarno juga telah dibuat khususnya yang melihat perjuangannya sejak era penjajahan Belanda. Karya Benedict R.G.O. Anderson, *Java in a time of revolution: occupation and resistance 1944-1946* memuat keterangan tentang peran penting Sukarno di masa pendudukan Jepang hingga tercapainya revolusi kemerdekaan. Dalam tulisannya, Anderson menjelaskan bagaimana Sukarno melakukan interaksi dengan para tokoh penting (*agent*) lainnya dalam proses

perubahan yang berlangsung dari struktur militer Jepang hingga menuju suatu struktur baru yang ditandai dengan kemerdekaan Indonesia.

METODE

Dari latar belakang yang disampaikan di atas, tampak jelas bahwa dalam kajian ini metodologi strukturasi menjadi sarana untuk menjelaskan proses rekonstruksi sekaligus untuk mengarahkan hasil analisis dalam bentuk kesimpulan. Meskipun tulisan ini lebih menunjukkan pada bentuk perbandingan (*comparative history*), namun ada kesamaan besar yang ditunjukkan oleh kedua fenomena itu. Kesamaan ini adalah adanya peran individu sebagai bagian dari struktur yang melalui kemampuan (*capability*)¹ dan lewat proses interaksi (*agency*) mampu mendobrak tatanan yang ada dan menciptakan tatanan baru sebagai karya mereka (reproduksi).

Penggunaan *comparative historical analysis* seperti yang disinggung di atas cukup penting mengingat dengan penerapan analisis tersebut akan bisa ditemukan persamaan dan perbedaan dalam usaha untuk mengangkat determinan kausalitas (*an effort to highlight causal determinants*) yang membentuk rangkaian peristiwa dan menjadi titik awal dari perkembangannya (Lange, 2013: 4).

Dengan meminjam istilah Anthony Giddens, *change and order*, kedua tokoh utama dalam peristiwa ini berusaha diungkapkan dengan latar belakang lingkungan hidup mereka dan arah pemikirannya yang mengakibatkan mereka mengalami benturan dengan struktur lama dan mendorong ide mereka untuk menciptakan struktur baru. Proses ini hanya bisa mereka hadapi dan jalani ketika keduanya memiliki modal dalam bentuk kemampuan (*capability*) dan dimungkinkan oleh aturan-aturan dari struktur yang ada.

Meskipun keduanya mengalami penekanan dari struktur lama, yakni penahanan oleh penguasa kolonial Belanda, dalam perubahan struktur yang terjadi mereka

¹Giddens menyebut *knowledgeability* dan *capability* dari *agent* sebagai berlaku universal bisa mempengaruhi kondisi bertindak (Brand and Jary, 2014: 100).

memperoleh peluang untuk menampilkan diri dan menggunakan kemampuannya. Baik rezim kolonial Inggris pada tahun 1812 maupun rezim militer Jepang pada tahun 1942 membuka peluang terhadap orang-orang yang dianggap lawan utama rezim lama, sebagai para tokoh yang dipercaya dan diberi kesempatan untuk memainkan peranan penting mereka, meskipun hal itu dimanfaatkan bagi kepentingan masing-masing rezim baru.

Dengan menggunakan pendekatan Giddens, Christopher Lloyd menyampaikan sebagai berikut:

Agency in general has two related meanings. First, it is the relative autonomous power that an entity or part of a system has to produce an effect, that is, to be an agent of a change or phenomenon. Second, it is the power that a person has to act on behalf of another, according to a certain remit or instruction, to try to bring about a result or outcome desired by the principal (Lloyd, 1989: 93).

Agency pada umumnya memiliki dua makna yang terkait. Pertama, *agency* merupakan kekuatan otonom yang bersifat relative sehingga satuan atau bagian dari suatu system menghasilkan efek, yakni menjadi agen perubahan atau fenomena. Kedua, *agency* merupakan kekuatan yang dimiliki orang untuk bertindak atas nama orang lain menurut pesan atau instruksi tertentu, dalam mencoba menciptakan hasil atau produk yang dikehendaki oleh pelaku utamanya.

Dari penjelasan Lloyd tersebut bisa diketahui bahwa unsur kekuatan (*power*) dalam proses perubahan yang dilakukan oleh *agent* sangat penting. Dengan kekuatan ini, maka perubahan bisa diciptakan oleh *agent* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai olehnya.

Apa yang dimaksud oleh Lloyd ini ditegaskan lebih lanjut demikian

Power is indeed unevenly distributed so that in all societies most people have little power to control and alter their own life patterns, while a few people have a great deal of power to control their own lives and the lives of others, and to manipulate and transform social situations and structures. The social embeddedness and class distinctiveness of power seem undeniable (Christopher Lloyd, 1989: 94).

Kekuatan sebenarnya terbagi tidak merata sehingga dalam semua masyarakat, kebanyakan orang memiliki sedikit kekuatan untuk mengontrol dan mengubah

pola hidup mereka sendiri, sementara sedikit orang memiliki banyak kekuatan untuk mengontrol hidupnya dan kehidupan orang lain dan memanfaatkan serta mengubah situasi dan struktur social. Ketrikatan social dan perbedaan klas kekuatan tampaknya tidak bisa dibantah.

Lloyd melihat bahwa tidak semua anggota (*agent*) dalam struktur bisa tampil untuk melakukan perubahan karena penguasaan kekuatan (*power*) tidak merata. Oleh karenanya *power* menjadi inti dari kemampuan untuk menciptakan proses perubahan, di samping keberadaan *agent* sendiri. Dalam hal ini *power* bisa diperoleh *agent* melalui kemampuannya (*capability*)nya sendiri seperti yang disampaikan oleh Giddens, maupun dimungkinkan oleh struktur yang berlaku dalam keberadaan *agent*.

A. Pangeran Notokusumo

Pangeran Notokusumo adalah seorang putra dari Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bertahta di Yogyakarta sebagai Sultan Hamengku Buwono I. Notokusumo dilahirkan di daerah Kedu pada tahun 1760, seperti kakaknya Raden Mas Sundoro yang kelak menggantikan ayahnya sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengku Buwono II. Ibunya adalah Raden Ayu Srenggoro, putri dari seorang bupati di tanah Kedu Kyai Tumenggung Notoyudo (Rouffaer, 1918: 603).²

Tidak lama setelah kelahirannya, seiring dengan posisi ayahnya yang semakin mapan bertahta di Yogyakarta, Notokusumo bersama ibunya dibawa ke Yogyakarta atas perintah Sultan Hamengku Buwono I dan sejak itu tinggal dan dibesarkan di lingkungan kraton Yogyakarta bersama kakaknya Raden Mas Sundoro. Keduanya memiliki hubungan dekat dengan ayahnya, dan ayahnya juga memberikan perhatian kepada kedua putranya yang diharapkan akan menjadi pilar utama Kesultanan Yogyakarta di masa mendatang. Ini terbukti ketika pada tahun 1780an, Raden Mas Sundoro dilantik menjadi putra mahkota sementara Notokusumo mendapatkan gelar

²Ada hubungan erat antara daerah Kedu dan Sultan Hamengku Buwono I karena pada masa perjuangannya melawan VOC sebelum tahun 1755, Kedu menjadi daerah gerilya Pangeran Mangkubumi. Oleh karenanya para putra utama Pangeran Mangkubumi dilahirkan di daerah Kedu dan juga memiliki darah keturunan elite penguasa Kedu (Louw, 1889: 49-50).

sebagai pangeran yang diminta untuk mendampingi kakaknya kelak memerintah sebagai raja di Yogyakarta (*Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig Bestuurs Jubileum van Zijne Hoogheid P.A.A. Pakoealam VII, hoofd van het Pakoealamsche huis 1906-1931*, tanpa tahun terbit: 2).

Sejak awal perhatian Sultan Hamengku Buwono I terhadap Pangeran Notokusumo sangat besar dan mereka menjalin hubungan yang baik, bahkan melebihi putra mahkota Raden Mas Sundoro. Salah satunya adalah kepercayaan sultan kepada Notokusumo yang ditugasi sebagai pemimpin kesatuan pengamanan kraton. Dengan tugas itu. Notokusumo mampu mengamankan kraton Yogyakarta dan wilayah kesultanan dari ancaman gerombolan *kecu* yang mengganggu keamanan kawula Yogyakarta. Berkat tindakan Notokusumo, suasana keamanan di Kesultanan Yogyakarta berhasil ditegakkan. Hal ini menumbuhkan kepercayaan Sultan Hamengku Buwono I yang semakin besar terhadap Notokusumo (Poensen, 1902: 346).³

Selain mendapatkan kepercayaan dan perhatian dari ayahnya, posisi Notokusumo secara politik kekeluargaan juga diperkuat lewat perkawinannya dengan putri Tumenggung Sosrowinoto, yang menjadi ayah Raden Ayu Adipati Sepuh atau permaisuri Sundoro yang merupakan putra mahkota. Dengan demikian Notokusumo memiliki hubungan periparan dengan Sundoro selain juga sebagai adik kandung.

Namun demikian langkah ini justru mulai menimbulkan kekhawatiran pada putra mahkota terhadap keberadaan Notokusumo. Selain juga statusnya yang semakin kuat dalam perkawinan dan perhatian serta simpati dari ayahnya, Notokusumo yang dikenal memiliki sikap yang mudah bergaul dan baik menimbulkan keseganan di lingkungan para petinggi kesultanan dibandingkan putra mahkota sendiri. Selain itu

³Gerombolan perampok yang disebut *bajag gento* itu disinyalir bukan sebagai kelompok criminal biasa, tetapi dicurigai dikirim oleh seorang penguasa dari luar Yogyakarta dengan tugas untuk menciptakan gangguan keamanan (*ngricugi*) di wilayah Yogyakarta. Keberhasilan Notokusumo ini bukan hanya menimbulkan pujian dari kalangan kraton kesultanan namun juga dari para bangsawan kasunanan Surakarta yang berada di perbatasan wilayah Yogyakarta dan terganggu oleh aksi kejahatan itu, bukti apresiasi ditunjukkan kepadanya.

juga bakat dan kemampuan pribadi yang dimiliki oleh Notokusumo sebagai ahli politik dan juga ahli seni cukup menonjol, yang menimbulkan kekaguman dari berbagai pihak seperti yang terbukti di bawah ini

Rekenen wij de periode vanaf de laatste decennia der 18de eeuw, toen Pakoe Alam I als jeugdige prins, Pangeran Notokoesoemo, reeds op zich de aandacht vestigde door zijn ijver voor de studie der Javaansche letteren, de politiek en de staatsinstellingen, tot den huidigen tijd als eene reeks van vijf geslachten, dan kan zonder overdrijving worden vastgesteld dat elk opvolgend gelacht zonder onderbreking een of meer waardige beofenaars der letterkunde en schooner kunsten levered (Dewantara, 1931: 1).

Jika kita memperhitungkan periode sejak decade terakhir abad XVIII, ketika Paku Alam I sebagai pangeran muda Pangeran Notokusumo mencurahkan perhatian dengan kerajinannya untuk mempelajari kesusastraan Jawa, politik dan lembaga Negara, sampai sekarang ini sebagai keturunan lima generasi, maka tanpa berlebihan bisa ditegaskan bahwa setiap generasi secara terus-menerus menghasilkan para tokoh sastra dan seni yang indah.

Meskipun kesaksian di atas berasal dari periode lebih dari satu abad kemudian, hal itu menjadi bukti bahwa Notokusumo mencoba menjadi perintis dalam peradaban baru untuk keturunannya, yang kelak akan menurunkan suatu dinasti yakni Pakualaman.

Tentu saja perkembangan yang dialami oleh Notokusumo ini menjadikan dirinya sebagai sumber ancaman bagi mereka yang dianggap mapan pada posisinya, khususnya putra mahkota Raden Mas Sundoro. Putra mahkota merasa bahwa perhatian dan kasih sayang ayahnya lebih banyak dicurahkan kepada Notokusumo daripada dirinya sebagai putra mahkota. Hal ini juga dia rasakan terhadap lingkungan sekitarnya yang lebih menyegani adiknya dan merasa takut atau menjaga jarak untuk bergaul dengannya.

Hal itu terbukti dari suatu babad yang dikutip oleh Poensen. Dalam babad tersebut dikisahkan bahwa Notokusumo bermimpi bertemu dengan almarhum Sultan Hamengku Buwono I dan mendapatkan perintah agar memegang kendali pemerintahan atas Kesultanan Yogyakarta. Ketika menyampaikan pesan ini kepada beberapa bangsawan tinggi di kraton, mereka juga mendukung bila Notokusumo

tampil sebagai raja pada kesempatan sebelum pelantikan Sundoro menjadi Sultan Hamengku Buwono II tahun 1792 sesuai dengan pesan ayahnya (*among anglindung waleripun ingkang swargi kemawon*) (Poensen, 1905: 78).

Sikap tersebut semakin jelas tampak setelah pelantikan tahta Sundoro menjadi Sultan Hamengku Buwono II pada tahun 1792. Notokusumo merasakan posisinya semakin sulit karena harus menghadapi dua pilihan: membantu raja sesuai perintah almarhum ayahnya dalam memerintah Kesultanan Yogyakarta, tetapi sekaligus menghadapi sikap Sultan yang tetap mencurigai dan tidak mempercayainya sepenuhnya. Akibatnya, Notokusumo sering mengeluhkan kondisi dan kesulitan tersebut kepada residen Yogyakarta van den Berg (*ANRI, Memorie van Overgave van J.G. van den Berg over het Jaar 1805, Bundel Yogyakarta, No 339*).

Posisi dan situasinya semakin rumit ketika kondisi internal di kraton Yogyakarta secara politik semakin kompleks pada awal abad XIX. Berbagai kepentingan yang berbeda-beda saling berjuang bukan hanya untuk mempertahankan eksistensi masing-masing namun juga untuk mendapatkan posisi yang strategis dalam jangka waktu lama. Konspirasi politik segera terjadi yang mengakibatkan terjadinya faksionalisme, dan ini diperparah dengan melibatkan raja secara langsung yang berusaha mempertahankan hegemoninya di antara perpecahan dan pertentangan internal di antara kerabatnya.

Sultan Hamengku Buwono II yang sejak muda menunjukkan sikap anti-Belanda ingin menegakkan integritas kedudukannya sekaligus kerajaannya terhadap tekanan dan ambisi teritorial VOC dan kemudian pemerintah Bataaf yang menggantikannya sejak tahun 1800.⁴ Raja ini merasa perlu untuk membentuk lingkaran kekuatan politik

⁴VOC yang menguasai Hindia Timur sebenarnya sejak tahun 1795 sudah dinyatakan bangkrut dan pemerintah Belanda tidak memperpanjang anggarannya sehingga dinyatakan berakhir keberadaannya pada tanggal 31 Desember 1799. Menurut aturan resminya, pemerintah Belanda mengambil alih semua milik dan tanggungjawab VOC termasuk koloninya di Hindia Timur. Namun pergolakan politik yang terjadi di Belanda sejak dekade terakhir abad XVIII mengakibatkan pembubaran Negara Belanda lama dan pembentukan Republik Bataf yang merupakan rekayasa rezim revolusioner Perancis (Beel, 1880: 72).

yang terdiri atas mereka yang dipercaya untuk melindungi diri bukan hanya terhadap ancaman Belanda namun juga terhadap orang-orang yang dicurigainya dari kalangan kerabatnya. Untuk itu, pada tahun 1803 ia mengangkat salah seorang putranya Raden Mas Surojo sebagai putra mahkota, yang lahir pada tahun 1770 dan telah diajukan sebagai calon putra mahkota pada 20 Agustus 1792, jadi hanya beberapa bulan sejak kenaikan Sultan Hamengku Buwono II.⁵

Langkah ini menciptakan kristalisasi dalam perpecahan di internal kerabat terutama mereka yang merasa disisihkan oleh raja. Salah satu tokoh penting yang dianggap sebagai “lawan” kelompok raja adalah Patih Danurejo II, yang sebelumnya bernama Raden Tumenggung Mertonegoro. Tokoh ini adalah putra bupati Banyumas yang sekaligus cucu dari Patih Danurejo I di zaman pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I. Karena tekanan residen VOC di Yogya Baron Wouter van Ijsseldijk, meskipun pada bulan-bulan terakhir keruntuhannya, pada tanggal 7 September 1799 diangkat menjadi patih menggantikan kakeknya yang wafat pada bulan Agustus 1799 (*ANRI, Memorie van Overgave van Residen Roubert Wouter van Ijsseldijk*, bundel Yogyakarta).

Karena hutang budinya dan juga karena posisinya yang rentan di depan raja, Danurejo II merasa lebih tergantung dan wajib meminta perlindungan kepada Belanda. Oleh karenanya sejak awal, Danurejo II lebih banyak berfungsi sebagai pembela kepentingan Belanda di kraton Yogyakarta daripada sebagai patih yang menjadi pelaksana perintah raja dalam bidang pemerintahan. Meskipun secara pribadi ia menjadi menantu Sultan Hamengku Buwono II lewat perkawinannya dengan Gusti Ratu Timur, Danurejo II tidak banyak membela raja dan mertuanya ketika terjadi benturan kepentingan dengan Belanda di Yogyakarta.

Selain dengan Sultan Hamengku Buwono II dan kelompok kerabatnya, Danurejo II juga merasa memiliki musuh besar lain yang dianggap berbahaya. Ia adalah

⁵Dalam tulisannya, J. Hageman menyebutkan bahwa Mangkubumi adalah Surojo dan memiliki saudara bernama Pangeran Timur yang kelak menjadi Pangeran Mangkudiningrat dan sangat dekat dengan Sultan (Hageman, 1860: 318).

Pangeran Notokusumo yang kemudian diperkuat oleh putranya Pangeran Notodiningrat serta beberapa bangsawan lain. Tujuan Notokusumo adalah menegakkan integritas dan kewibawaan kraton Yogya terhadap ancaman dan pelemahan oleh taktik Belanda yang didukung Danurejo II. Dengan demikian Notokusumo lebih berkepentingan menghadapi Danurejo II daripada terhadap Sultan Hamengku Buwono II meskipun ada kecurigaan dari kakaknya ini terhadap ambisinya (Veth, 1912: 274).

Dalam konstelasi politik demikian, Notokusumo memandang perlu untuk memiliki posisi dan pengaruh yang lebih kuat, terutama sejak Gubernur Jenderal H.W. Daendels pada bulan Februari 1808 menuntut penerapan aturan baru di kraton Yogya yang dianggap menurunkan kewibawaan raja Jawa (*ANRI, De Nieuwe Ceremonieel Regelen in Javaansche Kraton*, Bundel Solo).⁶ Notokusumo melihat bahwa tindakan tersebut menjadi awal intervensi kolonial dalam internal kraton, dan hal itu perlu dicegah sekuat tenaga. Oleh karenanya Notokusumo kemudian mengumpulkan sejumlah petinggi kraton seperti Ratu Kencono Wulan (permaisuri Sultan Hamengku Buwono II) yang putrinya Raden Ajeng Suratmi dinikahkan dengan putra Notokusumo, Tumenggung Notodiningrat⁷ pada tahun 1805, dan Raden Ronggo Prawirodirjo, adipati *Monconegoro Wetan* di Madiun yang sekaligus menjadi menantu Sultan Hamengku Buwono II dan komandan pasukan keamanan kraton.

Pembentukan konstelasi ini bukan berarti tanpa kepentingan sendiri. Ratu Kencono Wulan bersedia bergabung dengan Notokusumo dengan komitmen bahwa putranya akan diangkat menjadi raja sementara Notodiningrat menantunya akan bisa diangkat sebagai patih untuk mendampingi (Anon, 1844: 154-155). Dengan

⁶Aturan ini menyangkut tata cara penyambutan *Minister* yang merupakan wakil pemerintah Belanda di Vorstenlanden. Meskipun awalnya Sultan Hamengku Buwono II menolak menerapkannya, tekanan Daendels kepadanya di Bantulan pada tahun 1810 memaksakan pelaksanaan aturan ini di kratonnya.

⁷Notodiningrat adalah putra Notokusumo yang lahir dari perkawinannya dengan putri Tumenggung Sosrowinoto, adik ipar Patih Danurejo I pada tahun 1785 (Marihandono dan Juwono, 2008: 86).

melibatkan Raden Ronggo yang menjadi panglima pasukan kraton sejak 1805 menggantikan Tumenggung Notoyudo, Ratu Kencono Wulan memiliki harapan besar pada keberhasilan rencana dan ambisinya tersebut.

Tentu saja pihak yang paling terancam dengan rencana ini adalah Danurejo II. Sementara melalui Raden Ronggo⁸, kelompok Notokusumo bisa mendekati Sultan Hamengku Buwono II, Danurejo II merasa posisinya sangat berbahaya (Adams, 1931: 332). Oleh karenanya ia mendekati putra mahkota Raden Mas Surojo yang bersama adiknya Pangeran Adikusumo bisa digunakan untuk menjamin kelangsungan statusnya di kraton. Selain itu kepercayaan Danurejo II atas perlindungan dan dukungan Belanda sangat besar dalam menghadapi lawan-lawan politiknya.

Intervensi Daendels yang semakin gencar terhadap kesultanan Yogyakarta sebagai akibat laporan Danurejo II mengakibatkan ketegangan politik yang memuncak pada akhir 1810. Keseganan Sultan Hamengku Buwono II memenuhi sejumlah tuntutan Daendels selain peraturan penyambutan pejabat Belanda dituduhkan sebagai akibat hasutan kelompok Notokusumo yang mengandalkan kekuatan Ronggo Prawirodirjo. Oleh karenanya, untuk mewujudkan tuntutannya khususnya penguasaan atas produk hutan di Yogyakarta, Daendels mengambil tindakan tegas. Pada bulan Desember 1810 ia mengirimkan pasukan ekspedisi ke Madiun setelah tuntutan penyerahan Ronggo Prawirodirjo tidak dikabulkan oleh Sultan Hamengku Buwono II (Bruinsma, 1915: 762). Sebagai hasil dari ekspedisi ini pada tanggal 17 Desember 1810, Ronggo ditembak mati di desa Pasekaran, Kertosono (*Samboengan Boekoe Tjarita-an Tanah Djawa bagian ka-3*, 1890: 13).

Setelah hilangnya Ronggo, Daendels menuntut kepada Sultan Hamengku Buwono II agar menyerahkan Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Notodiningrat sebagai terdakwa pelaku utama konspirasi kraton bersama Ronggo. Sultan tidak memiliki pilihan lain kecuali menyerahkan kedua kerabatnya ini, yang oleh Daendels

⁸Selain sebagai panglima pasukan kraton, Ronggo juga menjadi adipati Monconegoro wetan dengan kedudukan di Madiun sejak tahun 1804 setelah menggantikan pejabat pendahulunya Pangeran Mangkudipuro yang dipecat oleh Sultan Hamengku Buwono II.

kemudian dibawa ke Batavia. Namun dalam perjalanan ke Batavia, keduanya diturunkan di Cirebon dan Daendels memerintahkan penahanan mereka di benteng Cirebon kepada *prefect* Matthijs Waterloo.

Meskipun dalam perintah Daendels tersirat bahwa Notokusumo dan Notodiningrat harus dilenyapkan, Waterloo yang mengenal Notokusumo sejak masa penugasannya di Yogyakarta tidak melaksanakan perintah itu.⁹ Di samping itu masa penahanan ini juga berlangsung tidak lama karena pada bulan Mei 1811 Daendels diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal dan digantikan oleh Jan Willem Janssens

Pemerintahan Janssens hanya berlangsung beberapa bulan, karena pada bulan Agustus 1811 pasukan Inggris mendarat di Batavia dan setelah pertempuran selama satu bulan, pada tanggal 11 September 1811 pemerintahan Belanda-Perancis di bawah Janssens menyerah di Tuntang kepada panglima Inggris Sir Samuel Auchmuty. Sejak itu pemerintahan Inggris dilaksanakan di Jawa di bawah Thomas Stamford Raffles.

Bagi Inggris, semua tahanan politik di masa Daendels/Janssens dianggap sebagai sekutu yang berharga untuk membantu pelaksanaan pemerintahannya. Salah satu dari mereka adalah Pangeran Notokusumo dan putranya Notodiningrat. Oleh karenanya pada bulan Desember 1811 dengan pendudukan Cirebon, keduanya dibebaskan dan bersama John Crawfurd yang diperintahkan oleh Raffles untuk menjadi residen di Yogyakarta, mereka berdua kembali ke Yogyakarta.¹⁰

Menghadapi perubahan baru ini, Notokusumo yang berorientasi anti-Belanda dan bermaksud ingin menegakkan kembali integritas Kesultanan Yogyakarta, memilih untuk bekerjasama dengan penguasa Inggris. Setibanya di Yogyakarta, Notokusumo

⁹Selain juga perkenalan pribadinya, Waterloo menerima nasehat Nahuys van Burgst untuk tidak melaksanakan perintah Daendels tersebut (Rangers, 1947: 175).

¹⁰Keduanya dibutuhkan oleh Raffles untuk menjadi penengah dalam ketegangan yang segera terjadi antara Sultan Hamengku Buwono II dan John Crawfurd akibat penolakan Sultan untuk menerima tuntutan status quo Inggris. Kunjungan Raffles ke kraton pada awal Desember 1811 juga tidak mampu mengubah pandangan Sultan. Akibatnya Raffles meminta Crawfurd agar kedua pangeran itu didatangkan ke Yogya dan tiba pada tanggal 16 Desember 1811 (Hageman, 1857: 417).

menjumpai kondisi bahwa perubahan telah terjadi. Putra Mahkota Surojo sejak Januari 1811 telah dijadikan penguasa sementara Sultan Hamengku Buwono II diturunkan. Namun hal ini tidak berlangsung lama mengingat Sultan kembali mengambil alih tahta dan menurunkan Surojo. Langkah ini diikuti dengan pembunuhan terhadap Danurejo II yang dianggap sebagai agen Belanda di Keraton Yogyakarta.

Dengan demikian perkembangan ini menjadikan Sultan Hamengku Buwono II sebagai sosok terkuat secara politik di kraton Yogyakarta dengan menyingkirkan lawan-lawannya. Posisinya diperkuat dengan mengangkat Tumenggung Sumodiningrat yang sebelumnya bergabung dengan Notokusumo melawan Daendels, namun berhasil selamat berkat perlindungan Sultan dan diangkat menjadi panglima pengawal raja menggantikan Raden Ronggo Prawirodirjo.

Akan tetapi kondisi itu tidak berlangsung lama. Setelah kunjungan Mayor Robinson ke kraton Yogyakarta pada bulan November 1811 untuk memperbaharui hubungan politik, tanda-tanda permusuhan kembali muncul karena Sultan Hamengku Buwono II tidak bersedia mengakui status quo yang diminta oleh Raffles. Ketegangan ini segera mengarah pada konflik dalam kunjungan Raffles ke Yogyakarta sebulan kemudian dan adanya konspirasi yang dibangun antara Sultan Hamengku Buwono II dan Sunan Paku Buwono IV di Surakarta.

Konspirasi ini bermaksud untuk bekerjasama mengusir Inggris dan merebut kembali lahan yang dirampas oleh Daendels. Untuk itu surat-menyurat terjadi antara kedua raja Jawa ini. Notokusumo mendengar hal ini melalui orang-orang yang setia kepadanya dan mengetahui bahwa upaya itu tidak akan berhasil. Menurutnya perlawanan terhadap pemerintah Inggris akan sia-sia dan justru mengakibatkan resiko yang besar bagi Kesultanan Yogyakarta. Bertolak dari hal tersebut, ia mengingatkan Sumodiningrat tentang resiko yang bisa terjadi. Akan tetapi Sultan tetap bertahan pada pendapatnya sehingga pada tanggal 18 Juni 1812 tentara Inggris menyerang kraton

Yogyakarta dan terjadi peristiwa *bedah Ngayogyakarta* (Collis, 2000: 58).¹¹ Sebagai akibat dari peristiwa itu, Raffles menurunkan Sultan Hamengku Buwono II dari tahta dan menahannya di benteng *Fort Cornwallis* di Pulau Penang (Thorn, 2012: 190). Sebagai penggantinya Surojo kembali diangkat menjadi raja dengan gelar Sultan Hamengku Buwono III.

Sementara itu jasa Notokusumo dalam hal ini mendapatkan penghargaan dari Raffles, di samping juga arti strategis kebijakan Inggris bagi *Vorstenlanden* untuk mengawasi Kesultanan Yogyakarta. Dengan bertolak dari kepentingan itu, pada tanggal 17 Maret 1813 Raffles memberi Notokusumo status sebagai Pangeran *Merdika* seperti yang dimiliki oleh Mangkunegoro di Surakarta dan menduduki tahta sebagai Pangeran Paku Alam, yang memulai dinasti Pakualaman. Melalui statusnya ini, Notokusumo juga mendapatkan tanah apanage seluas 2000 *cacah* yang terletak di Kulon Progo (Adikarto) (Anon, 1861: 139). Dengan demikian perjuangan Notokusumo mencapai puncak dengan menjadi seorang penguasa merdeka di wilayah Yogyakarta, namun dinastinya tetap menjadi pendamping bagi Kesultanan Yogyakarta sepanjang sejarahnya.

B. Ir. Sukarno

Sukarno dilahirkan di kampung Paneleh, di kota Surabaya dengan nama Kusno pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya adalah Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Dilihat dari nama kedua orangtuanya, Sukarno atau Kusno dilahirkan dari kalangan elite pribumi atau setidaknya kelas menengah dalam struktur sosial masyarakat. Kedua orang tua Sukarno memiliki latar belakang kelas bangsawan dari masing-masing etnisnya, Jawa dan Bali. Bahkan ibu Sukarno memiliki nama yang menunjukkan asal-usulnya dari kasta brahmana sebagai kasta tertinggi

¹¹Penyerbuan terhadap kraton Yogya dilakukan oleh pasukan berkekuatan hampir seribu orang yang terdiri atas tentara Inggris dan Sepoy di bawah pimpinan Kolonel Robert R. Gillespie. Oleh karenanya peristiwa ini juga sering dikenal sebagai *Geger Sepoy* (Hannigan, 2012: 249).

dalam masyarakat Bali.¹² Namun demikian dalam kehidupan sejak kecil hingga dewasa, Sukarno lebih banyak dibesarkan dalam lingkungan budaya Jawa sehingga karakteristik sebagai sosok orang Jawa cukup jelas.

Selain dari latar belakang elitis pada keluarganya, status pekerjaan orang tuanya sebagai guru menunjukkan bahwa Sukarno dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan intelektual modern yang akan mempengaruhi pola berpikir dalam pertumbuhannya. Terutama waktu kelahiran Sukarno sangat mendukung suasana tersebut karena pada saat itu Politik Etis sebagai pedoman kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia menekankan pendidikan sebagai salah satu aspek dalam program kerjanya bagi masyarakat pribumi.

Dengan perpaduan dua gaya kehidupan tersebut, elitis dan intelektual, bisa dipahami bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pemuda Sukarno selanjutnya. Hingga usia remaja, Sukarno telah menerima fasilitas pendidikan modern yang disediakan oleh orangtuanya. Melalui koneksi ayahnya sebagai guru, pada bulan Juni 1911 Sukarno dalam usia 10 tahun bisa memasuki *Europeesche Lagere School* di kota Mojokerto, sekolah yang disediakan terutama bagi anak-anak Eropa dan Indo-Eropa dengan standard yang tinggi bagi non-Eropa.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di ELS, pada tahun 1915 Sukarno meneruskan sekolahnya ke *Hoogere Burger School* di kota Surabaya dan mengambil jurusan B (ilmu pasti alam). Seperti halnya ELS, HBS yang merupakan sekolah menengah dengan masa belajar lima tahun, merupakan sekolah yang diutamakan bagi anak-anak Eropa. Dalam hal ini bukan hanya masa belajar yang lebih singkat dibandingkan dengan sekolah menengah untuk anak-anak non-Eropa (MULO, AMS) namun juga memberikan kualitas pelajaran yang bisa menyiapkan para muridnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

¹²Darah Bali dari kasta tertinggi yang mengalir pada Sukarno mengakibatkan pengaruhnya di Bali sangat besar sampai sekarang. Orang Bali mengakui hubungan kekerabatan itu dan jugamengidendikkan Sukarno dengan budaya Bali (Putra, dalam Jennifer Lindsay and Maya H.T. Liem, 2012: 335).

Selama bersekolah di HBS ini, Sukarno mondok di sebuah rumah milik Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto. Di pondokan ini, Sukarno bertemu dengan sejumlah teman seusianya seperti Muso, Alimin, Darsono, Abdul Muis dan Agus Salim. Selain bersama kawan-kawan ini, Sukarno juga memperoleh banyak informasi dari Tjokroaminoto yang merupakan ketua gerakan Sarekat Islam, suatu organisasi politik berbasis Islam yang cukup dominan dalam dunia pergerakan pada dekade kedua abad XX di Indonesia. Melalui pergaulan dengan Tjokroaminoto dan kawan-kawannya, Sukarno memperoleh ide tentang dunia politik dan pergerakan dari berbagai latar belakang ideology. Dari situ, Sukarno kemudian merumuskan konsepnya tentang perpaduan ideology (nasionalisme, Islamisme dan komunisme) dalam perjuangannya di masa mendatang sekaligus menjadi konsep doktriner bagi pedoman kehidupan bernegara.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di HBS pada bulan Juli 1921, Sukarno meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi. Jurusan yang diminatinya adalah tehnik bangunan, sehingga pilihannya jatuh pada *Hoogere Technische School* (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung yang dimasukinya pada awal tahun 1922. Setelah menempuh pendidikan selama empat tahun, Sukarno dinyatakan lulus ujian sebagai insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 dan diwisuda pada tanggal 3 Juli 1926 (*Algemeen Handelsblad voor Nederland*, 19 Juni 1926).¹³

Akan tetapi dibandingkan karir pendidikannya, aspek politik dan organisasi dalam kehidupan Sukarno lebih menonjol. Selama menjadi siswa di HBS, dalam nuansa pergaulannya di rumah pondokan, Sukarno menjadi aktivis dalam organisasi massa. Pada mulanya ia bergabung dalam gerakan politik Tri Koro Dharmo sebagai cabang kepemudaan dari Budi Utomo, yang pada tahun 1918 kemudian berubah menjadi Jong Java. Berkaitan dengan hal itu, Sukarno juga mulai memperkenalkan

¹³Bersama Soetedjo dan Anwari, Sukarno adalah tiga orang insinyur yang lulus pertama tahun itu dari beberapa belas orang peserta ujian lainnya. Kemudian Sukarno dan Anwari membuka kantor teknis di Bandung untuk biro arsitek bangunan.

ide-ide politiknya secara tertulis agar dikenal oleh public lewat artikelnya yang dimuat dalam surat kabar milik SI, “Oetoesan Hindia”.

Hubungan eratnya dengan SI yang telah terbina sejak belajar di Surabaya dilanjutkan ketika duduk di bangku kuliah. Hal ini terjadi lewat tinggalnya di rumah milik seorang tokoh SI Jawa Barat yaitu Haji Sanusi. Pada saat tinggal di tempat ni, Sukarno menjalin kontak dengan para tokoh politik dari Indische Partij, yaitu Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara). Tjipto Mangunkusumo dan Douwes Decker.

Dengan pengetahuan politiknya, semangat perjuangan Sukarno untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka dan bebas dari penindasan serta dominasi asing tumbuh pesat. Setelah lulus dari THS, Sukarno tidak kembali ke Jawa Timur melainkan tetap berada di Bandung. Pada tahun-tahun kuliahnya, ia telah mengilhami pembentukan *Algemeene Studie Club*¹⁴ dan tidak lama kemudian ia mengubahnya menjadi sebuah partai politik yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diproklamirkan pada tahun 1927 (*De Nieuwe Vorstenlanden*, 13 Desember 1926; *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 26 September 1927).

Partai Nasional Indonesia ini menganut garis perjuangan radikal, yaitu tidak mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial (non-koperasi). Ini diwujudkan dengan melarang pegawai pemerintah menjadi anggotanya dan selalu menyerang kebijakan pemerintah kolonial lewat mass media meskipun tidak menggunakan jalur kekerasan fisik. Setidaknya selama hampir tiga tahun, Sukarno melalui PNI terus melakukan perjuangan menentang kolonialisme sehingga akhirnya pemerintah Belanda memutuskan untuk menangkapnya pada tanggal 29 Desember 1929 dan menjebloskannya ke penjara Banceuy dengan tuduhan membuat keresahan (*De Sumatra Post*, 30 Desember 1929).¹⁵

¹⁴Studi klub ini dipimpin oleh Sukarno, Dermawan dan Anwari. Sejak pendiriannya, pemerintah Belanda mencurigai bahwa studi klub ini berafiliasi dengan gerakan komunis karena sifat radikalismenya.

¹⁵Sukarno ditangkap bersama Gatot Mangkuprojo.

Selama satu tahun penyelidikan dilakukan terhadap dirinya dan setelah semua bukti dinyatakan lengkap, Sukarno dihadirkan ke persidangan pengadilan negeri (*landraad*) Bandung bersama beberapa rekan pergerakannya dari PNI pada tanggal 18 Desember 1930. Dalam persidangan itu, Sukarno membacakan pembelaannya yang kemudian dikenal sebagai Indonesia Menggugat. Dalam vonisnya tanggal 27 Desember 1930, pengadilan menyatakan Sukarno bersalah dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara potong tahanan yang harus dijalannya di rumah tahanan Sukamiskin, Bandung sampai tanggal 31 Desember 1931 (*Het Volk*, 27 Desember 1930; *De Locomotief*, 30 Desember 1931).

Setelah keluar dari penjara, Sukarno melihat kenyataan bahwa partainya telah dinyatakan bubar dan terlarang oleh pemerintah Belanda. Oleh karenanya untuk meneruskan perjuangannya demi kemerdekaan Indonesia, ia memilih bergabung dengan rekan dan pengacaranya Mr. Sartono yang telah membentuk organisasi politik Partindo pada bulan Juli 1932. Ternyata partai ini merupakan penjelmaan dari PNI lama karena sebagian besar anggotanya adalah bekas anggota PNI, dan Sukarno tetap menggunakannya untuk perjuangan nasionalismenya kembali.

Karena sikapnya yang keras dan revolusioner terhadap pemerintah, pada awal bulan Agustus 1933 pemerintah Belanda memutuskan untuk menangkap kembali Sukarno¹⁶. Kini pemerintah Belanda mengambil tindakan untuk mencegah kembalinya Sukarno ke panggung politik dan berhubungan dengan bekas pengikut dan rekan-rekannya, yaitu dengan mengasingkannya ke Ende, pulau Flores. Tujuannya adalah agar Sukarno terisolasi dari rekan-rekannya yang lain meskipun di Flores diperkenankan membawa keluarganya (*De Indische Courant*, 17 Februari 1934).

Ketika selama ditahan di Flores Sukarno berhasil menjalin hubungan dengan penduduk setempat dan melalui fasilitas yang disediakan oleh institusi agama di sana, Sukarno berhasil menyiarkan ide-ide Indonesia merdeka kepada penduduk setempat

¹⁶Sukarno ditangkap karena dituduh membuat dan menyebarkan brosur “Mencapai Indonesia Merdeka” selain juga sejumlah tulisan kerasnya yang dimuat dalam harian *Fikiran Rajat* di Bandung (*De Locomotief*, 1 Agustus 1933).

dan beberapa orang Indonesia yang juga ditahan di tempat itu. Akibatnya pemerintah Belanda kemudian memutuskan setelah lima tahun kemudian untuk memindahkan Sukarno ke tempat pembuangan baru di Bengkulu pada tahun 1938 (*De Indische Courant*, 5 Mei 1938).¹⁷ Sukarno tetap tinggal di tempat ini selama tahun-tahun terakhir pemerintahan Belanda dengan terus menyiarkan ide-ide perjuangan kemerdekaan nasionalnya kepada penduduk Bengkulu.

Ketika tentara Jepang menyerbu Indonesia dan mengambil alih kekuasaan dari Belanda pada tanggal 9 Maret 1942, status Sukarno masih menjadi tahanan politik di Bengkulu, Perhatian pemerintah militer Jepang kepada Sukarno dan para tokoh politik yang melawan Belanda segera muncul pada bulan-bulan pertama pendudukan ketika mereka membutuhkan dukungannya dalam rangka memobilisasi masyarakat Indonesia dalam membantu upaya perangnya melawan Sekutu.¹⁸

Hanya dalam waktu satu minggu, Sukarno mendapatkan perhatian dari panglima Jepang di Sumatra yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Pada tanggal 17 Maret 1942 Sukarno dijemput oleh utusan panglima itu dan dihadapkan kepadanya dan ditanya

*Anda sebagai patriot sangat cinta kepada rakyat. Anda menghendaki suatu Indonesia Merdeka. Namun tahukah Anda bahwa Indonesia merdeka hanya bisa terwujud melalui kerjasama dengan Jepang? (Asia Raya, tanggal 13 November 1944).*¹⁹

Menghadapi tawaran tersebut, Sukarno tidak memiliki pilihan lain kecuali hanya menerimanya. Pada saat yang bersamaan panglima Jepang di Jawa Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menerima masukan dari sejumlah pemuda pergerakan yang dipanggil ke istana. Melalui mereka Imamura mengetahui nilai Sukarno dalam perjuangannya

¹⁷Selama perjalanan dari Flores ke Bengkulu via Surabaya dan Batavia (dengan kereta api), Sukarno mendapatkan pengawalan ketat oleh agen-agen polisi politik Hindia Belanda. Di Surabaya Sukarno hanya diberi waktu 15 menit untuk bertemu keluarganya di stasiun.

¹⁸Kapten Sakaguchi yang diperintahkan menjemput Sukarno berkata kepadanya: “Kami merasa terhormat bertemu Anda Tuan Sukarno, karena nama Anda telah terkenal di Asia. Kami tahu bahwa Anda adalah orang yang sangat berpengaruh dan pemimpin di negeri ini” (Geerken, 2017: 130).

¹⁹Tulisan ini merupakan pengakuan Sukarno sendiri yang disampaikan lewat pidato radio beberapa hari sebelumnya.

melawan Belanda dan manfaatnya bagi kepentingan rezim militer. Untuk itu, ia kemudian memerintahkan penjemputan Sukarno dari Bengkulu. Kolonel Nakayama adalah perwira yang diperintahkan oleh Imamura untuk menjemput dan berhubungan dengan Sukarno agar bersedia bekerjasama dengan rezim militer. Dalam catatannya, Nakayama memberikan kesaksian sebagai berikut

Door de gesprekken die ik met hem had, kreeg ik de indruk dat hij een man was met een ijzeeren wil, wiens hartstocht voor de onafhankelijkheid hem nooit verliet. Ik bewonderde hem zeer en was er van overtuigd dat hij in zijn openbare revedoeringen over de gemeenschappelijke welvaart sprak. Daarom vormde ik een commissie, die eens per week vergaderde en onder mijn directe toezicht de instelling van een burgerlijk bestuur zou bestuderen (Brugmans, 1960: 480).

Melalui pembicaraan yang aku lakukan dengannya, aku menangkap kesan bahwa dia adalah sosok dengan keinginan kuat yang guratan hatinya bagi kemerdekaan tidak pernah lepas darinya. Aku sangat mengaguminya dan yakin bahwa dalam pidato umum tentang kemakmuran rakyat dia akan menyampaikannya. Karenanya saya membentuk sebuah komisi yang sekali setiap minggu mengadakan rapat di bawah pengawasanku langsung akan mempelajari pembentukan pemerintahan sipil.

Dari sini setelah tiba di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1942, Sukarno menyatakan kesediaannya kepada Imamura untuk bekerjasama dengan Jepang namun dengan jaminan bahwa Jepang akan memungkinkan tercapainya Indonesia merdeka, bukan sebagai bagian dari Jepang atau sebagai Negara boneka Jepang. Ini terbukti dari penolakan Sukarno untuk bergabung dalam gerakan Tiga A yang dibentuk pada tanggal 8 April 1942 di bawah bekas tokoh Parindra, Sjamsudin. Menurut Sukarno, gerakan Tiga-A tidak mencerminkan kepentingan Indonesia melainkan lebih banyak mengutamakan kepentingan Jepang.

Kesepakatan ini akhirnya terwujud dengan pembentukan organisasi massa pertama yang disetujui oleh Jepang pada tanggal 8 Desember 1942 yaitu Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Dalam organisasi ini Sukarno bersama tiga tokoh Indonesia lainnya (Muh, Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan Haji Mas Mansyur) duduk sebagai pimpinan. Putera secara resmi disahkan pada tanggal 8 Maret 1943 oleh Jenderal Kumakichi

Harada, sebagai pengganti Imamura yang dipindahkan pada bulan November 1942. Tujuan Putera adalah mengontrol rakyat dan menyalurkan aktivitas mereka demi kepentingan mendukung program perang Jepang (Pluvier, 1974: 219).

Tampaknya Jepang mengetahui bahwa Putera kurang maksimal mendukung kepentingannya dan hanya dimanfaatkan oleh Sukarno serta para tokoh lain untuk mengobarkan semangat juang rakyat bagi kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya setahun kemudian, rezim militer membubarkan Putera dan menggantikannya dengan Djawa Hokokai pada tanggal 1 Maret 1944. Djawa Hokokai memiliki jangkauan lebih luas dengan mencakup juga bukan hanya orang pribumi melainkan orang Timur Asing dan Indo-Eropa. Dengan demikian Jepang bermaksud menekan peran Sukarno dalam memanfaatkan organisasi massa bentukannya.

Akan tetapi niat Jepang juga tidak bisa diterapkan seutuhnya. Jepang tetap memerlukan kehadiran Sukarno karena kemampuan Sukarno dan pengaruhnya yang mulai meluas di kalangan masyarakat bagi pengerahan massa. Sebagai akibatnya, dalam struktur kepemimpinan Djawa Hokokai, Sukarno bersama Hatta dan Mas Mansur tetap menduduki posisi penting (Tuong Vu, 2010: 163).

Ketika situasi perang Pasifik semakin tidak menguntungkan bagi Jepang, Tokyo mengambil kebijakan yang lebih lunak untuk menarik dukungan bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengeluarkan janji pemberian kemerdekaan bagi Indonesia. Sebagai langkah tindak lanjut, pada bulan April 1945 pemerintah militer membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Sukarno duduk di dalamnya (Benda, Kames, Irikura and Kishi, 1965: 260-261).

Dengan pembentukan BPUPKI ini langkah menuju kemerdekaan Indonesia tidak lagi terbendung meskipun ada upaya Jepang untuk menunda sampai September 1946. Dalam hal ini Sukarno memainkan peranan penting dan ini terbukti dengan pidato yang disampaikannya pada tanggal 1 Juni 1945 tentang dasar Negara Indonesia yang merdeka, yang dikenal sebagai Pancasila di depan sidang umum BPUPKI.

Dengan demikian aspirasi nasional bagi suatu Negara merdeka yang baru telah disiapkan dan langkah menuju kemerdekaan telah dekat.²⁰

Rezim militer mengikuti perkembangan ini dengan serius dan pada akhir Juli 1945 Sukarno bersama Hatta dan beberapa tokoh lainnya dipanggil menemui panglima kawasan selatan Jepang Marsekal H. Terauchi di Dalat, Saigon untuk mendapatkan informasi tentang sikap terakhir Tokyo. Dalam pembicaraan ini, Terauchi mengatakan bahwa Tokyo menyatakan pemberian kemerdekaan Indonesia diserahkan kepada para pemimpin Indonesia dan Sukarno diminta kembali ke Indonesia untuk melakukan persiapannya (Husein, 2010: 40).

Setibanya kembali di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945, Sukarno kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas menyiapkan secepat mungkin langkah-langkah teknis bagi proklamasi kemerdekaan dan pembentukan Negara Indonesia baru. Sukarno yang tampil kembali sebagai pimpinan panitia bersama beberapa tokoh lain berhasil menyatukan pandangan di antara para anggotanya terutama menyangkut dasar ideology Negara.

Sukarno tampaknya masih berpegang pada komitmen yang dibuat dalam pembicaraan dengan Terauchi tentang tanggal kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya ketika penyerahan Jepang kepada Sekutu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945, Sukarno tetap menolak desakan kelompok pemuda agar secepatnya memproklamlirkan kemerdekaan Indonesia. Penolakan ini mengakibatkan penculikannya ke Rengasdengklok dari Jakarta oleh para pemuda dan pembicaraan yang berlangsung di sana pada tanggal 15 Agustus 1945 mengarah pada kesepakatan bahwa proklamasi akan diumumkan beberapa hari kemudian. Setelah pembuatan konsep naskahnya di rumah Laksamana Maeda pukul 04.00 tanggal 17 Agustus 1945,

²⁰Pancasila yang disampaikan oleh Sukarno saat itu berbeda dengan Pancasila yang sekarang menjadi dasar resmi Negara RI. Urutan sila-sila versi Sukarno adalah: nasionalisme Indonesia, peri kemanusiaan, musyawarah, keadilan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari situ diketahui bahwa hanya perbedaan susunan sila yang ditemukan dibandingkan Pancasila sekarang, sementara pada prinsipnya tidak banyak perbedaan (Friend, 1988: 113).

Sukarno bersama Hatta dan para tokoh lain mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada pukul 10.00 yang menandai lahirnya Negara baru yaitu Indonesia merdeka. Keesokan harinya Sukarno dipilih sebagai presiden pertama RI (Anderson, 1972: 82).

C. Analisis

Dua tokoh tersebut di atas dan jalan hidup serta perjuangan mereka masing-masing menarik untuk dianalisis dalam konteks komparatif. Seperti yang dikatakan oleh Matthew Lange di atas, bahwa komparatif history akan mengangkat perbedaan dan persamaan dari suatu fenomena sejarah dalam perbedaan ruang dan waktu. Dalam hal ini juga akan dicoba untuk melakukan komparasi antara keduanya dalam konteks struktur dan perubahan struktur yang dialaminya.

Ditinjau dari aspek momentum historis kesamaan yang muncul adalah keduanya berada pada awal suatu bentuk struktur baru. Notokusumo lahir pada awal kesultanan Yogyakarta terbentuk sebagai suatu entitas politik dengan hegemoninya pasca Perjanjian Giyanti, dengan demikian Notokusumo memasuki suatu periode baru dalam historiografi Yogyakarta sebagai saksi dari upaya penegakkan integritas politik oleh Sultan Hamengku Buwono I dalam memantapkan posisinya dan status kerajaannya dalam konstelasi politik Jawa akhir abad XVIII.

Sementara itu Sukarno juga lahir pada awal pembentukan struktur baru, yaitu dengan dimulainya penerapan Politik Etis di Hindia Belanda sebagai upaya pembentukan tatanan pemerintahan kolonial modern. Melalui kebijakan ini, Sukarno memasuki era kehidupan yang diwarnai dengan upaya pencerdasan individu lewat program edukasi kolonial yang sebenarnya dimaksudkan untuk menegakkan eksistensi birokrasi Hindia Belanda pada abad XX. Situasi ini jelas memberikan modal bagi Sukarno untuk mengembangkan diri bukan hanya menghadapi situasi baru tetapi juga membekali diri dengan kemampuan baru yang diperolehnya.

Pada tahap awal perjuangannya, keduanya menghadapi struktur serupa yang ditegakkan oleh rezim kolonial sebagai lawan utama mereka. Notokusumo melindungi

diri dalam konspirasi politik di dalam kraton, sedangkan Sukarno menggunakan kesempatan dalam pergerakan nasional sehingga mampu memperoleh posisi yang strategis. Keduanya harus mengakhiri sementara perjuangannya ketika tidak mampu menghadapi tekanan struktur yang ada dan harus menghentikan perjuangannya di penjara: Notokusumo di Cirebon, sementara Sukarno di Sukamiskin, Bengkulu dan Ende.

Faktor ketiga yang menunjukkan kesamaan struktural adalah keduanya mampu memanfaatkan perubahan struktur yang ada demi keamanan posisinya. Notokusumo memanfaatkan kehadiran pemerintah Inggris yang menggantikan Belanda dan menawarkan kerjasamanya, sementara Sukarno menggunakan rezim militer Jepang dalam rangka memperjuangkan ide-ide politiknya. Melalui pemanfaatan perubahan struktural yang berlangsung, keduanya akhirnya mencapai tujuan masing-masing sebagai factor keempat: Notokusumo membentuk dan menjadi pemimpin dinasti Pakualaman, Sukarno membentuk dan memimpin Indonesia merdeka.

Tentu saja ada perbedaan antara keduanya yang mewarnai perjuangan mereka: Notokusumo tidak bisa melepaskan diri dari konteks politik Kesultanan Yogyakarta di mana dirinya tetap tunduk kepada sultan-sultan yang berkuasa, sementara Sukarno memiliki kebebasan dalam hal ini. Sukarno tidak tunduk kepada struktur kolonial, yang dibuktikan dengan kebebasannya dalam membangun gerakan kepartaian dan menjadi musuh dari struktur yang berlaku.

Dari komparasi di atas, keduanya tetap dinyatakan sebagai *agent* dari struktur yang ada dan mampu menggunakan fasilitas yang dimungkinkan oleh struktur untuk melakukan aktivitas mereka (*agency*). Dengan menggunakan konsep Lloyd di atas, keduanya telah dibekali dengan *power* yang ada sejak awal: Notokusumo adalah putra raja sementara Sukarno adalah keturunan elite kelas menengah. Dalam pertumbuhannya mereka juga menggunakan kemampuan (*capability*) yang diperoleh selama perjuangannya: Notokusumo memanfaatkan dukungan dari kelompok istana, sementara Sukarno menggunakan pengetahuan yang diperoleh lewat jenjang pendidikannya.

Ditinjau dalam keberhasilan *agency* mereka, keduanya mengalami persamaan yaitu kegagalan dalam melakukan perubahan struktural di bawah rezim kolonial Belanda. Namun demikian dengan berubahnya struktur, mereka bisa menggunakan potensi dan fasilitas yang diberikan oleh struktur baru untuk melakukan perubahan secara menyeluruh demi keberhasilan upaya dan ide-ide mereka.

KESIMPULAN

Analisis sejarah komparatif terutama pada sosok yang tampil dalam melakukan dan memimpin proses perubahan perlu dilakukan untuk bisa bukan hanya menemukan kesamaan nilai melainkan juga bisa untuk mengangkat peran tokoh lain yang selama ini masih memerlukan penjelasan. Melalui komparatif, nilai-nilai salah satu tokoh angkat terangkat dan terbukti memiliki kualitas perjuangan yang sama meskipun dalam konteks ruang dan zaman berbeda.

Dalam kajian ini, nilai perjuangan Pangeran Notokusumo sebagai pendiri dinasti Pakualaman pada dasarnya serupa dengan perjuangan Ir. Sukarno bagi seluruh bangsa dan Negara Indonesia. Tentu saja perbedaan zaman menentukan dalam masing-masing baik dari aspek filosofis, politik maupun juga geografis. Di era awal abad XIX pemikiran Notokusumo tidak mencakup seluruh Hindia Belanda, melainkan terbatas pada lingkup Kesultanan Yogyakarta atau setidaknya pada pulau Jawa bagian tengah. Sementara itu filosofis politik Sukarno sudah menjangkau seluruh Indonesia dengan bentuk Negara nasional yang modern.

Dari komparasi ini khususnya bagi Pangeran Notokusumo, perannya dalam *agency* atau proses perubahan struktur menjadi sangat penting ketika ditempatkan dalam struktur Kesultanan Yogyakarta atau konstelasi politik Jawa awal abad XIX. Perjuangannya yang berakhir sebagai *pangeran merdika* dan pendiri dinasti Pakualaman ditentukan oleh peran dan kemampuannya untuk itu meskipun tidak ada rencana oleh struktur yang dirancang untuk mengarah ke sana, yang berbeda dengan Sukarno dengan ide perjuangan kemerdekaannya sejak di bawah rezim kolonial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, L., “Geschiedkundige Aanteekeningen omtrent de Residentie Madioen” dalam *Djawa*. tahun 1931. jilid XIX.
- Anderson, Benedick R. O.G. 1972. *Java: in a time of revolution: occupation and resistance 1944-1946*. Ithaca: Cornell University Press.
- Anon. “Bijdrage tot de geschiedenis van Vorstenlanden op Jawa” dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*. tahun 1861. jilid II.
- Anon. “Overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het Djocjakartasche rijk, sedert deszelfs stichting (1755) tot aan het einde van het Engelsche tusschenbestuur (1815)” dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*. tahun 1844. jilid III.
- ANRI, *De Nieuwe Ceremonieel Regelen in Javaansche Kraton*. dalam bundel Solo.
- ANRI, *Memorie van Overgave van J.G. van den Berg over het jaar 1805*. bundel Yogyakarta.
- ANRI, *Memorie van Overgave van Residen Roubert Wouter van Ijsseldijk*. bundel Yogyakarta.
- Beel, H.J., “Oost Indie na den val der Compagnie” dalam *Tijdspiegel*. tahun 1880, jilid 1.
- Benda, Harry J., Kames K., Irikura and Koicjhi Kishi. 1965. *Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documents*. Michigan: Yale University Press.
- Brand, Christopher G.A., and David Jary. 2014. *Giddens’s theory of structuration: a Critical Appreciation*. Oxford: Taylor and Francis.
- Brugmans, I.J. 1960. *Nederlandsch Indie onder Japanse besetting: gegevens en documenten over de jaren 1942-1945*. Franeker, T., Wever.
- Bruinsma, A, E, J,. “Boschregeling in tijdperk van den Gouverneur Generaal Daendels”. dalam *Tectona*. jilid VIII tahun 1915.
- Collis, Maurice. 2000. *Raffles*. Singapore: Graham Brash.

- Djoko Marihandono dan Harto Juwono. 2008. *Sultan Hamengku Buwono II*. Yogyakarta: Banjar Aji Production.
- Friend, Theodore. 1988. *The Blue-eyed enemy: Japan against the West in Java and Luzon 1942-1945*. New Jersey: Princenton University Press.
- Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig Bestuurs Jubileum van Zijne Hoogheid P.A.A. Pakoealam VII, hoofd van het Pakoealamsche huis 1906-1931*.
- Geerken, Horst H. 2017. *Hitler's Asian Adventure*. Bonn, BoD.
- Hageman, J., "De Engelschen op Java" dalam *Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap*. tahun 1857. jilid VI.
- Hageman, J., "Geschied en Aardrijkskundig overzicht van Java op het einde der Achttiende eeuw" dalam *Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap*. tahun 1860. jilid IX.
- "Inlandsche Bandoengsche Ingenieurs" dalam *Algemeen Handelsblad voor Nederland*. tanggal 19 Juni 1926.
- "Ir. Soekarno naar Benkoelen" dalam *De Indische Courant*. tanggal 5 Mei 1938.
- "Ir. Soekarno's vrijlating" dalam *De Locomotief*. tanggal 30 Desember 1931.
- Ki Hadjar Dewantara. *Letteren en kunst in het Pakoealamsche geslacht*. 1931. Djokja, H. Bunning.
- "Krachtig Politioneel Optreden tegen de PNI" dalam *De Sumatra Post*. tanggal 30 Desember 1929.
- Lange, Matthew. 2013. *Comparative Historical Methods*. London: SAGE Publ.
- Lindsay, Jennifer and Maya H.T. Liem. 2012. *Heirs to World Culture: Being Indonesia 1950-1965*. Leiden. KITLV Press.
- Lloyd, Christipher. 1989. *The Structures of History*. Oxford: Blackwell Publ.
- "Onder toezicht der politie" dalam *De Nieuwe Vorstenlanden*. tanggal 13 Desember 1926.
- "Pengembangan Rakjat Indonesia ke arah kemerdekaan kini dimoelai" dalam *Asia Raya*. tanggal 13 November 1944.

- “Perserikatan National Indonesia” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*. tanggal 26 September 1927.
- Pluvier, Jan. 1974. *Southeast Asia from Kolonialism to Independence*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Poensen, C., “Amangku Buwana II Sepuh” dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land en Volkenkunde*. tahun 1905.
- Poensen, C., “Mangkoeboemi, Ngajogjakarta’s eerste Soeltan” dalam *Bijdrage tot de Taal, Land en Volkenkunde*. tahun 190. jilid 52.
- Rushdy Husein. 2010. *Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati*. Jakarta. Kompas.
- Samboengan Boekoe Tjarita-an Tanah Djawa bagian ka-3*. 1890. Surabaya: Gebr. Gimberg en Co.
- “Soekarno gevonnist” dalam *Het Volk*. tanggal 27 Desember 1930.
- Stibbe, D.G., en H.J. de Graaf. 1918. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, vierde deel*. ‘s Gravenhagge: Martinus Nijhoff.
- Thorn, William. 2012. *The Conquest of Java; nineteenth century Java seen through the eyes of a soldier of British Empire*. Vermont: Tuttle Publishing.
- Tuong Vu. 2010. *Paths to development in Asia: South Korea, Vietnam, China and Indonesia*, New York: Cambridge University Press.
- Veth, P.J. 1912. *Java Geographisch, Ethnologisch, Historisch, tweede deel: Nieuwe Geschiedenis*, Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Welderren-Rangers, Daniel Welco van. 1947. *The failure of liberal kolonial policy in Jawa Netherland East India (1816-1830)*. The Hague: Martinus Nijhoff.